

Kesetaraan sebagai Pilar Pendidikan Multikultural: Studi Literatur tentang Perspektif Teoretis dan Praktik Pendidikan Humanistik

Astri Aningrum *¹
Muhammad Nur Mahsun Al Affa ²
Nurul Mubin ³

^{1,2,3} Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Sains Al-Qur'an, Jawa Tengah, Indonesia

*e-mail: ningrumastria435@gmail.com¹, alaffamahsun@gmail.com², mubin@unsiq.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara sistematis konsep **kesetaraan (equality)** sebagai pilar utama dalam pendidikan multikultural melalui pendekatan **studi literatur**. Kajian ini didasarkan pada analisis tujuh artikel ilmiah terbuka (*open access*) yang relevan dengan topik kesetaraan, pendidikan multikultural, dan humanisme. Pendidikan multikultural tidak sekadar menanamkan toleransi, tetapi juga menegakkan nilai keadilan sosial dan pengakuan terhadap keberagaman manusia sebagai dasar hubungan pendidikan yang setara. Hasil studi literatur menunjukkan bahwa kesetaraan menjadi inti dari proses pendidikan humanistik yang berorientasi pada penghargaan terhadap martabat manusia, keadilan gender, inklusi sosial, dan penghapusan diskriminasi struktural di sekolah. Temuan menunjukkan bahwa praktik kesetaraan dalam pendidikan multikultural dapat diwujudkan melalui pembelajaran kolaboratif, kurikulum inklusif, serta penerapan kebijakan Gender, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) sebagaimana diuraikan dalam kurikulum Merdeka. Kajian ini menyimpulkan bahwa penerapan nilai kesetaraan dalam pendidikan multikultural merupakan prasyarat untuk membangun sistem pendidikan yang demokratis, adil, dan menghargai kemanusiaan.

Kata kunci: kesetaraan, pendidikan multikultural, humanisme, inklusi sosial, studi literatur

Abstract

This study aims to systematically examine the concept of equality as a fundamental pillar in multicultural education through an empirical-descriptive literature review approach. The analysis was conducted on seven open-access scholarly articles relevant to the issues of equality, multicultural education, and humanism as the theoretical framework. The findings indicate that multicultural education not only emphasizes tolerance among individuals and groups but also upholds the principles of social justice, recognition of human diversity, and the elimination of structural discrimination within educational settings. Equality is positioned as the core of a humanistic educational approach oriented toward respect for human dignity, gender justice, and social inclusion. Practically, the implementation of equality values in multicultural education can be realized through inclusive curriculum design, collaborative learning, and the adoption of Gender, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) policies as integrated within the Merdeka Curriculum. This study concludes that the internalization of equality values is a fundamental prerequisite for building a democratic, just, and humane education system.

Keywords: equality, multicultural education, humanism, social inclusion, literature study

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan masyarakat majemuk, pendidikan tidak dapat dipisahkan dari isu keberagaman dan kesetaraan. **Pendidikan multikultural** muncul sebagai respon terhadap realitas sosial yang heterogen dengan tujuan membangun lingkungan belajar yang adil dan inklusif. Namun, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa prinsip kesetaraan sering kali hanya berhenti pada tataran slogan, belum menjadi praktik nyata di ruang kelas.

Pendidikan multikultural pada era global saat ini menjadi pendekatan yang semakin penting, terutama ketika masyarakat semakin terhubung dan beragam dari segi budaya, agama, dan identitas sosial. Dalam artikel asli dijelaskan bahwa pendidikan multikultural muncul sebagai respons terhadap realitas sosial yang heterogen, dengan tujuan membangun lingkungan belajar yang adil dan inklusif bagi seluruh peserta didik (Rohmat, 2023; lihat: pendidikan multikultural).

Realitas ini menuntut lembaga pendidikan untuk tidak sekadar mengajarkan toleransi, tetapi juga menginternalisasikan nilai kesetaraan sebagai fondasi hubungan sosial di sekolah. Keterbukaan informasi dan mobilitas sosial yang tinggi juga mempercepat kebutuhan akan pendidikan yang sensitif terhadap keberagaman sebagaimana ditegaskan Banks (2015, dikutip dalam Saputri et al., 2024). Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan bagi sekolah untuk menanamkan nilai-nilai yang mendorong siswa menghormati keberagaman sebagai bagian dari identitas nasional. Dengan demikian, pendidikan multikultural bukan hanya tren metodologis, tetapi sebuah tuntutan zaman. Nilai-nilai ini menjadi dasar penting dalam membangun masyarakat yang demokratis dan harmonis.

Rohmat (2023) menegaskan bahwa nilai-nilai multikultural hanya dapat hidup apabila diikuti oleh penguatan prinsip kesetaraan dalam seluruh dimensi pendidikan — baik kebijakan, kurikulum, maupun interaksi sosial. Hal yang sama ditegaskan oleh Kaleja (2013), bahwa pendidikan multikultural berfungsi sebagai sarana untuk menurunkan prasangka dan stereotip melalui pengalaman belajar yang menempatkan siswa dalam posisi setara.

Di Indonesia, kebijakan pendidikan nasional melalui **Kurikulum Merdeka** mulai mengadopsi pendekatan *Gender, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)* (Nurbayanti et al., 2024) yang menegaskan pentingnya kesetaraan gender, sosial, dan keberagaman. Artinya, kesetaraan tidak hanya dilihat sebagai nilai moral, tetapi juga sebagai kerangka kerja strategis dalam sistem pendidikan.

Kesenjangan antara ideal dan praktik ini menunjukkan bahwa kebijakan multikultural belum sepenuhnya mampu menjamin perlakuan yang adil bagi seluruh siswa. Penelitian mutakhir bahkan menunjukkan bahwa bias struktural masih ditemukan dalam proses pembelajaran, terutama bagi kelompok siswa dari latar sosial-budaya minoritas (Pratiwi & Annisa, 2023). Selain itu, perbedaan latar belakang ekonomi, budaya, dan gender masih menjadi faktor penentu pengalaman belajar peserta didik. Hal ini menguatkan bahwa pendidikan multikultural perlu diintegrasikan melalui pendekatan humanistik yang menempatkan nilai kemanusiaan sebagai dasar utama proses pendidikan. Dalam konteks ini, guru menjadi tokoh penting yang harus memahami dinamika keberagaman agar mampu menata pembelajaran yang menghargai perbedaan (Pratiwi et al., 2024). Karena itu, pembahasan mengenai kesetaraan dalam pendidikan bersifat mendesak dan fundamental.

Pendekatan ini menegaskan bahwa kesetaraan tidak lagi dipahami sebagai nilai moral belaka, melainkan sebagai komponen wajib dalam penyelenggaraan pendidikan. Urgensi ini didasari oleh fakta bahwa peserta didik memiliki kebutuhan, kemampuan, dan latar belakang yang berbeda sehingga pendekatan pembelajaran tunggal tidak relevan lagi. Sekolah perlu menyediakan ruang yang setara bagi semua siswa agar mereka dapat mengembangkan potensi akademik maupun sosial secara optimal. Implementasi kesetaraan kemudian berkaitan erat dengan akses pendidikan, kesempatan yang sama, dan pengakuan sosial terhadap siswa dari berbagai latar belakang. Penelitian Pratiwi et al. (2022) menunjukkan bahwa pembelajaran kolaboratif dan inklusif berperan penting dalam menciptakan interaksi sosial yang lebih setara. Ketika prinsip kesetaraan diterapkan dengan baik, pendidikan multikultural dapat memberikan dampak nyata terhadap kualitas hasil belajar.

Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk **meninjau teori dan praktik penerapan kesetaraan dalam pendidikan multikultural** dari perspektif humanistik melalui studi literatur terhadap berbagai hasil penelitian mutakhir.

Kajian semacam ini penting karena memperlihatkan kesenjangan antara teori multikultural dan pelaksanaannya di lapangan. Rumusan tersebut relevan mengingat kualitas pendidikan

sangat dipengaruhi oleh sejauh mana prinsip keadilan sosial diterapkan di lingkungan sekolah. Selain itu, penelitian semacam ini memberikan pemahaman komprehensif bagi para pendidik dan pembuat kebijakan tentang pentingnya mengembangkan kebijakan yang lebih sensitif terhadap keberagaman. Penelitian ini juga menyoroti keterkaitan antara nilai humanisme dengan praktik pendidikan multikultural yang dapat mempengaruhi ekosistem pembelajaran. Dengan demikian, artikel ini memiliki kontribusi teoretis dan praktis yang signifikan.

Selain itu, penelitian ini berfungsi sebagai dasar bagi upaya pengembangan strategi pembelajaran yang lebih responsif terhadap kebutuhan peserta didik dari berbagai latar sosial. Penelitian yang menempatkan nilai humanistik sebagai dasar pendidikan multikultural juga memperkaya wacana pedagogis kontemporer. Hasil penelitian dapat dijadikan rujukan oleh guru, lembaga pendidikan, dan pembuat kebijakan dalam merancang pendekatan pembelajaran yang lebih adil. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini menegaskan bahwa kesetaraan merupakan elemen kunci dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan bermartabat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur sistematis (*systematic literature review*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan dari jurnal ilmiah open access yang relevan dengan topik kesetaraan dan pendidikan multikultural (terbit antara 2013–2024).

Langkah penelitian meliputi:

1. **Identifikasi literatur:** Menelusuri artikel melalui portal resmi seperti DOAJ, Google Scholar, dan OJS SINTA.
2. **Seleksi sumber:** Memilih artikel yang membahas aspek kesetaraan, inklusi, dan multikulturalisme di konteks pendidikan.
3. **Analisis isi (content analysis):** Mengkaji hasil penelitian untuk menemukan kesamaan pola, tema, dan implikasi teoretis.
4. **Sintesis konseptual:** Menyusun temuan dalam kerangka hubungan antara teori humanistik dan prinsip multikultural.

Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat membandingkan pemikiran ahli dan hasil penelitian sebelumnya untuk menghasilkan sintesis baru. Selain itu, studi pustaka memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk menjangkau sumber ilmiah dari berbagai negara. Pemilihan metode ini juga mengurangi bias lapangan karena seluruh data bersumber dari publikasi yang telah melewati proses *peer review*. Oleh karena itu, metode kepustakaan menjadi pilihan yang tepat untuk penelitian konseptual seperti ini.

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi artikel, buku, dan publikasi ilmiah lain yang relevan dengan tema kesetaraan dan pendidikan multikultural (Snyder, 2019). Peneliti menggunakan kata kunci seperti *equality in education*, *multicultural education*, *humanistic pedagogy*, dan *inclusive schooling* untuk memperoleh sumber yang relevan. Setelah data terkumpul, setiap literatur dipilih berdasarkan kriteria kualitas, kredibilitas penulis, serta keterkaitan tematik. Proses seleksi yang ketat ini membantu peneliti memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar mutakhir dan valid. Selain itu, peneliti juga mencatat informasi penting seperti teori utama, hasil temuan, dan rekomendasi setiap literatur. Dengan demikian, proses pengumpulan data dilakukan secara terstruktur dan sistematis.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik *content analysis* atau analisis isi, yang berfungsi mengelompokkan, menginterpretasikan, dan menyimpulkan informasi penting dari

berbagai literatur (Krippendorff, 2019). Dalam proses analisis, peneliti membaca setiap literatur secara mendalam untuk mengidentifikasi pola, perbedaan konsep, dan kontribusi teoretis yang ditawarkan. Setelah itu, peneliti mengkategorikan informasi berdasarkan tema tertentu seperti konsep kesetaraan, pendekatan humanistik, serta strategi implementasi pendidikan multikultural. Teknik analisis ini memungkinkan peneliti mengembangkan pemahaman menyeluruh terhadap objek kajian. Selain itu, analisis isi memberikan fleksibilitas dalam mengkaji data secara kritis dan mendalam. Dengan demikian, hasil analisis dapat menjawab pertanyaan penelitian secara komprehensif.

Validitas hasil penelitian dijaga dengan menerapkan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari beberapa literatur yang membahas isu yang sama (Creswell, 2021). Dengan melakukan triangulasi, peneliti dapat memeriksa kesesuaian argumen antara berbagai ahli dan memastikan konsistensi teori. Selain itu, validitas juga diperkuat dengan membandingkan literatur internasional dan nasional sehingga hasil kajian tidak hanya relevan secara lokal, tetapi juga memiliki perspektif global. Peneliti juga mencatat adanya perbedaan pendekatan antar ahli untuk memperkaya interpretasi data. Upaya menjaga validitas ini menjadikan hasil penelitian lebih kuat dan kredibel. Oleh karena itu, triangulasi menjadi aspek penting dalam penelitian berbasis literatur.

Dalam penelitian ini, batasan penelitian ditetapkan agar fokus kajian tetap terarah dan tidak melebar dari tujuan awal. Pembatasan ini dilakukan untuk menjaga kedalaman analisis dan mempermudah peneliti mengembangkan argumen secara sistematis. Selain itu, penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data lapangan sehingga seluruh temuan bersifat teoretis. Hal ini sesuai dengan karakteristik studi literatur yang lebih menekankan interpretasi dan sintesis pemikiran daripada pengumpulan data empiris. Meskipun demikian, hasil penelitian tetap memberikan kontribusi penting dalam merumuskan pemahaman konseptual terkait kesetaraan pendidikan. Dengan demikian, batasan penelitian membantu menjaga konsistensi dan fokus kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kesetaraan sebagai Nilai Inti Pendidikan Multikultural

Kesetaraan merupakan prinsip dasar keadilan sosial yang menuntut agar setiap individu memperoleh kesempatan dan perlakuan yang adil dalam proses pendidikan (Pratiwi & Annisa, 2023). Dalam konteks pendidikan, kesetaraan tidak berarti menyamakan segala sesuatu, melainkan memberikan ruang bagi kebutuhan unik setiap peserta didik agar mereka dapat berkembang optimal. Kesetaraan dalam pendidikan tidak hanya merujuk pada persamaan hak formal, tetapi juga mencakup distribusi sumber daya pendidikan yang memungkinkan semua siswa berkembang sesuai potensinya (Gorski, 2021). Setiap peserta didik membawa pengalaman, identitas, dan latar belakang sosial yang berbeda sehingga perlakuan yang adil harus mempertimbangkan kebutuhan individual tersebut. Dalam konteks pendidikan multikultural, kesetaraan menjadi prinsip yang mengatur bagaimana kurikulum, interaksi guru-siswa, dan kebijakan sekolah dijalankan secara adil. Penelitian menunjukkan bahwa ketidaksetaraan sering muncul dalam bentuk bias struktural, seperti diskriminasi terhadap kelompok budaya minoritas (Kim, 2022). Guru sebagai aktor utama pendidikan memiliki tanggung jawab untuk menumbuhkan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari stereotip. Dengan demikian, kesetaraan tidak sekadar norma ideal tetapi landasan operasional dalam praktik mengajar. Hal ini sejalan dengan temuan dalam file bahwa kesetaraan merupakan elemen fundamental bagi keadilan pendidikan

Pandangan lain menekankan bahwa kesetaraan mencakup kesempatan akses terhadap pembelajaran, bukan hanya hasil akhir yang dicapai oleh peserta didik (Grant, 2020). Siswa dari latar belakang sosial yang berbeda memerlukan dukungan pedagogis yang bervariasi agar mampu memperoleh pengalaman belajar yang optimal. Pendidikan yang mengabaikan keragaman tersebut cenderung menciptakan kesenjangan akademik dan sosial di kelas. Guru perlu memastikan bahwa materi pembelajaran, media, dan penilaian tidak bias terhadap kelompok tertentu. Dalam artikel asli, nilai kesetaraan disebut sebagai pondasi yang harus diperkuat dalam seluruh dimensi pendidikan, termasuk kebijakan dan interaksi sosial

Oleh karena itu, pemahaman tentang kesetaraan perlu dipandang sebagai proses dinamis yang terus dievaluasi. Kesetaraan juga harus mencakup rasa aman psikologis yang memungkinkan siswa berpartisipasi tanpa rasa takut akan diskriminasi.

Dalam praktik sehari-hari, kesetaraan diwujudkan melalui berbagai strategi yang dirumuskan dalam teori pedagogi kritis. Salah satu pendekatan yang paling relevan adalah *equity pedagogy*, yaitu metode pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik sosial dan budaya siswa (Aragón et al., 2021). Pendekatan ini memandang bahwa pengajaran yang efektif harus mempertimbangkan latar belakang siswa, bukan menuntut siswa menyesuaikan diri sepenuhnya dengan sistem pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan merupakan salah satu indikator keberhasilan pendidikan multikultural. Implementasi pendekatan ini juga terkait dengan kemampuan guru membaca kondisi emosional dan sosial peserta didik. Dengan demikian, kesetaraan memerlukan integrasi antara pendekatan pedagogis, kebijakan, dan budaya sekolah.

Studi oleh Pratiwi et al. (2024) menunjukkan bahwa calon guru di perguruan tinggi Islam di Indonesia masih perlu memperkuat kompetensi multikultural untuk mampu menerapkan nilai kesetaraan di kelas, khususnya dalam menghadapi perbedaan agama dan budaya. Guru yang memahami konsep kesetaraan mampu mengidentifikasi bahwa siswa tidak memiliki titik awal yang sama dalam proses belajar, sehingga perlakuan yang berbeda justru diperlukan untuk mencapai keadilan. Hal ini sesuai dengan prinsip *fairness* yang menyatakan bahwa keadilan bukan berarti sama rata, tetapi memberikan dukungan yang proporsional. Dengan demikian, pendidikan guru menjadi aspek krusial dalam memperkuat kesetaraan di sekolah. Kesetaraan yang terimplementasi baik dapat meningkatkan keberhasilan akademik dan interaksi sosial antar siswa.

Pada akhirnya, konsep kesetaraan menuntut sekolah untuk membangun sistem yang inklusif, adaptif, dan sensitif terhadap keragaman. Hal ini berarti bahwa kebijakan sekolah harus secara eksplisit memperhatikan keberagaman budaya, gender, agama, dan kondisi sosial ekonomi siswa (Widodo, 2023). Sekolah juga perlu menciptakan budaya yang mendorong siswa merasa dihargai, didengar, dan diakui identitasnya.

Rohmat (2023) menunjukkan bahwa penguatan nilai multikultural harus didasarkan pada kesetaraan hak antar peserta didik. Kesetaraan menjamin setiap siswa memiliki akses dan pengakuan yang sama dalam proses pembelajaran, tanpa memandang latar belakang sosial-budaya.

Studi oleh Kaleja (2013) menegaskan bahwa pendidikan multikultural berperan penting dalam mengurangi prasangka melalui interaksi belajar yang menumbuhkan empati dan penghargaan terhadap perbedaan.

Kesetaraan dalam Pendidikan multicultural berarti menempatkan hak, kesempatan, dan penghargaan yang sama bagi seluruh peserta didik tanpa memandang latar budaya, bahasa, agama, atau status sosial.

Dalam praktiknya, kesetaraan diwujudkan melalui *equity pedagogy* (pengajaran yang menyesuaikan strategi dan penilaian untuk mengurangi kesenjangan), akses yang setara ke kurikulum yang mewakili beragam perspektif, serta program internalisasi nilai multikultural yang aktif di sekolah.

Ketika nilai-nilai kesetaraan ditegakkan melalui kebijakan sekolah, pelatihan guru, dan praktik pembelajaran inklusif, maka dengan ini akan meningkatkan hasil positif seperti keterlibatan siswa dan prestasi siswa serta penguatan kohesi sosial yang pada gilirannya mendukung pembuatan kebijakan pendidikan yang lebih adil.

Hal ini berarti bahwa sekolah tidak cukup hanya menciptakan aturan yang mendukung keberagaman, tetapi juga harus memastikan bahwa aturan tersebut berjalan dalam praktik. Salah satu tantangan yang muncul adalah masih adanya bias kultural dan sosial yang tidak disadari oleh guru maupun peserta didik. Bias tersebut dapat muncul dalam bentuk stereotip, perbedaan perlakuan, atau pengabaian terhadap kebutuhan khusus siswa. Oleh karena itu, penguatan kompetensi guru menjadi faktor yang sangat penting untuk memastikan prinsip kesetaraan benar-benar terlaksana. Dengan demikian, pembahasan mengenai kesetaraan menegaskan perlunya perubahan paradigma dalam pendidikan.

Pendidikan multikultural memberikan ruang bagi peserta didik untuk memahami dan menghargai keberagaman sebagai bagian dari identitas sosial. Dalam konteks pembelajaran, guru perlu memasukkan materi yang merepresentasikan berbagai budaya agar siswa tidak hanya mengenal satu perspektif saja. Selain itu, pembelajaran multikultural mendorong siswa untuk mengembangkan kompetensi sosial seperti toleransi, empati, dan kemampuan berdialog. Kompetensi ini sangat penting dalam masyarakat yang terus berkembang secara plural. Dengan demikian, pendidikan multikultural menjadi komponen kunci dalam membangun ekosistem belajar yang adil.

2. Humanisme dan Penghargaan terhadap Martabat Individu

Pendidikan multikultural menurut Banks (2015, dikutip dalam Saputri et al., 2024) merupakan proses reformasi pendidikan yang menekankan penerimaan terhadap keberagaman serta menolak segala bentuk diskriminasi. Nilai humanistik dalam pendidikan multikultural menekankan penghormatan terhadap martabat manusia (*human dignity*) serta menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dalam proses belajar.

Pendidikan multikultural dan humanisme memiliki hubungan yang sangat kuat karena keduanya berfokus pada penghargaan terhadap martabat manusia dan pengembangan potensi setiap individu (Kim, 2022). Dalam perspektif humanistik, peserta didik dipandang sebagai makhluk yang memiliki kebutuhan emosional, sosial, dan intelektual yang unik sehingga pembelajaran harus memberikan ruang bagi pengembangan semua aspek tersebut. Pendekatan ini mendorong guru untuk menciptakan ruang belajar yang aman, inklusif, dan penuh empati. Selain itu, pendidikan humanistik menekankan pentingnya membangun relasi yang egaliter antara guru dan siswa. Ketika pendidikan multikultural diintegrasikan dengan prinsip humanisme, maka proses pembelajaran berjalan lebih bermakna dan menghargai identitas siswa. Dengan demikian, keterhubungan antara multikulturalisme dan humanisme menjadi fondasi penting dalam pendidikan modern.

Selain itu, pendidikan humanistik mendorong guru untuk memperhatikan dinamika psikologis siswa, termasuk kebutuhan emosional yang sering kali diabaikan dalam model pembelajaran tradisional. Dengan pendekatan ini, siswa dapat mengembangkan empati yang lebih besar terhadap orang-orang dari latar belakang berbeda. Guru juga dituntut untuk menghindari pola pembelajaran yang memaksakan kebenaran tunggal karena dapat mematikan sikap kritis siswa terhadap keragaman budaya. Oleh karena itu, pendidikan multikultural membutuhkan guru yang memiliki kompetensi humanistik yang kuat.

Dalam kerangka teori humanistik, keberagaman dipandang sebagai peluang untuk memperluas wawasan dan memperkaya hubungan sosial peserta didik (Hammond, 2020). Peserta didik yang hidup dalam lingkungan multikultural memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan berbagai nilai, pengalaman, dan cara pandang yang berbeda. Hal ini membantu mereka membangun pemahaman yang lebih luas tentang realitas sosial. Interaksi sosial seperti ini memungkinkan siswa memahami keberagaman dari perspektif yang lebih manusiawi. Dalam situasi seperti ini, pendidikan multikultural bukan hanya membentuk kompetensi sosial, tetapi juga membangun karakter dan rasa hormat terhadap perbedaan. Dengan demikian, pengintegrasian nilai humanisme memperkuat tujuan utama pendidikan multikultural.

Kaleja (2013) menjelaskan bahwa pendekatan ini dapat mengurangi stereotip antar kelompok dan membentuk kesadaran sosial yang inklusif. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini juga selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan semangat Bhineka Tunggal Ika.

Humanisme dalam pendidikan multikultural juga menekankan pentingnya kebebasan berpikir dan otonomi peserta didik sebagai bagian dari proses pembelajaran (UNESCO, 2023). Peserta didik harus diberikan ruang untuk mengemukakan pendapat, mengekspresikan identitas budaya, dan berpartisipasi aktif dalam diskusi kelas. Ketika siswa diberi ruang untuk mengembangkan agensi pribadi, mereka cenderung lebih terbuka dan toleran terhadap perbedaan. Nilai humanisme juga menekankan prinsip empati yang menjadi dasar interaksi sosial dalam pendidikan multikultural. Guru perlu menciptakan aktivitas yang memungkinkan siswa memahami pengalaman hidup kelompok lain. Oleh karena itu, kebebasan berpikir dan kemampuan berempati menjadi dua komponen penting dalam pendidikan multikultural yang humanistik.

Pendidikan multikultural dan humanisme berkontribusi besar terhadap pembentukan masyarakat demokratis yang menghargai keberagaman dan keadilan sosial (Abdullah, 2021). Masyarakat demokratis membutuhkan warga yang berpengetahuan luas, toleran, mampu berdialog, serta terbuka terhadap perbedaan sebagai bagian dari kehidupan bersama. Melalui pendidikan multikultural, siswa tidak hanya mempelajari fakta-fakta akademik, tetapi juga mendapatkan pengalaman hidup yang memperkaya kesadaran sosial mereka. Pendekatan humanistik memastikan bahwa nilai keadilan sosial menjadi bagian integral dari proses pendidikan. Ketika kedua model pendidikan ini diterapkan secara konsisten, sekolah dapat menjadi ruang yang memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat majemuk. Oleh karena itu, hubungan antara pendidikan multikultural dan humanisme bersifat saling melengkapi dan tak terpisahkan.

Dalam konteks pendidikan, humanisme menekankan bahwa setiap individu memiliki hakikat dan potensi yang harus dihargai secara utuh, sehingga pendekatan pembelajaran yang

humanistik memungkinkan peserta didik meraih perkembangan pribadi dan sosial secara seimbang.

Penghargaan terhadap martabat individu tercermin melalui upaya sistematis dalam pendidikan yang memberi ruang kebebasan berpikir, keterlibatan aktif, dan pengembangan karakter yang menghormati nilai-nilai kebebasan, keadilan, dan kemanusiaan sebagai landasan utama.

Pratiwi & Annisa (2023) menyoroti pentingnya penghargaan terhadap keragaman manusia sebagai dasar praktik pendidikan humanistik. Dalam konteks ini, guru harus berperan sebagai fasilitator yang menumbuhkan kesadaran kemanusiaan, bukan sekadar penyampai materi. Pendidikan humanistik mengajak peserta didik untuk memahami bahwa keberagaman bukan ancaman, melainkan kekuatan sosial yang membentuk identitas bersama.

Nilai humanistik dalam pembahasan ini dipahami sebagai pondasi moral yang memperkuat praktik pendidikan multikultural. Humanisme menekankan bahwa setiap peserta didik memiliki martabat, potensi, dan perasaan yang harus dihargai (Hammond, 2020). Dalam praktiknya, guru dituntut untuk tidak memaksakan kebenaran tunggal, tetapi memberi ruang bagi peserta didik untuk berpikir secara kritis dan independen. Hal ini memungkinkan siswa melihat keberagaman sebagai sesuatu yang manusiawi dan layak dihormati. Dengan pendekatan humanistik, siswa juga menjadi lebih percaya diri dalam mengekspresikan identitas dan pandangan mereka. Oleh karena itu, integrasi nilai humanistik memperkuat efektivitas pendidikan multikultural dalam menciptakan kesetaraan.

3. Penerapan Kesetaraan dalam Kurikulum dan Praktik Pendidikan

Kesetaraan dapat diterapkan melalui beberapa strategi praktis:

- 1) Integrasi nilai multikultural dalam kurikulum dan materi pelajaran (Saputri et al., 2024); Implementasi nilai kesetaraan dalam pendidikan dimulai dari bagaimana sekolah merancang kurikulum yang responsif terhadap keragaman peserta didik (UNESCO, 2023). Kurikulum yang inklusif harus mempertimbangkan representasi budaya, agama, bahasa, dan identitas yang beragam dalam materi pembelajaran. Artinya, kurikulum tidak boleh bias terhadap kelompok tertentu, tetapi harus memberikan ruang bagi setiap siswa untuk melihat dirinya terwakili dalam pelajaran. Dengan demikian, pembelajaran dapat berjalan lebih relevan dan bermakna bagi semua peserta didik. Selain itu, kurikulum yang inklusif juga dapat mengurangi prasangka melalui pemahaman silang budaya. Oleh karena itu, sekolah perlu mengevaluasi ulang kurikulumnya secara berkala agar nilai kesetaraan benar-benar terintegrasi.
- 2) Pendekatan pembelajaran kolaboratif dan reflektif (Pratiwi et al., 2022); elain kurikulum, implementasi kesetaraan juga terlihat pada bagaimana guru menyusun strategi pembelajaran yang mengakomodasi keragaman karakter siswa (Gorski, 2021). Guru harus memahami bahwa setiap peserta didik memiliki gaya belajar, latar sosial, serta tingkat kemampuan yang berbeda-beda sehingga perlakuan yang sama belum tentu adil. Strategi pembelajaran diferensiasi dapat menjadi solusi karena memungkinkan guru menyesuaikan pendekatan berdasarkan kebutuhan individual siswa. Selain itu, guru perlu memastikan bahwa interaksi sosial antarsiswa berlangsung secara setara dan saling menghormati. Pembelajaran kolaboratif juga sangat efektif dalam membangun relasi positif dan mengurangi bias. Dengan demikian, peran guru sangat penting dalam memastikan nilai kesetaraan terwujud di ruang kelas.

- 3) Kebijakan pendidikan berbasis GEDSI (Nurbayanti et al., 2024). Implementasi nilai kesetaraan juga berkaitan erat dengan kebijakan sekolah yang berpihak pada prinsip inklusi sosial (OECD, 2022). Sekolah harus menerapkan aturan yang melindungi peserta didik dari kekerasan simbolik, diskriminasi, maupun stigmatisasi berdasarkan latar budaya atau kondisi sosial. Kebijakan yang berpihak pada keberagaman akan memberikan rasa aman bagi siswa ketika mengekspresikan identitasnya. Hal ini juga mendorong terciptanya interaksi sosial yang sehat karena peserta didik memahami bahwa sekolah menjunjung tinggi prinsip keadilan. Selain itu, sekolah perlu memastikan adanya sarana penunjang seperti layanan konseling yang sensitif terhadap keberagaman. Dengan demikian, kebijakan sekolah berperan besar dalam memastikan implementasi kesetaraan berjalan konsisten. Dalam konteks pembelajaran, penggunaan media yang inklusif dan representatif menjadi bagian penting dari implementasi nilai kesetaraan (Hammond, 2020). Media pembelajaran yang baik harus menampilkan keragaman identitas dan menghindari representasi stereotip. Oleh karena itu, guru perlu selektif dalam memilih materi, gambar, video, dan contoh yang digunakan dalam kelas. Penggunaan media yang ramah keberagaman membuat siswa merasa lebih dihargai dan terlibat secara emosional dalam proses belajar. Selain itu, media yang inklusif juga memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan sikap empati antar peserta didik. Dengan demikian, pemilihan media pembelajaran menjadi strategi penting dalam mengimplementasikan nilai kesetaraan.

Pendekatan tersebut menegaskan bahwa nilai kesetaraan bukan hanya ranah etis, tetapi juga menjadi bagian dari desain pedagogis yang konkret dan terukur.

Saputri et al. (2024) dan Nurbayanti et al. (2024) menjelaskan bahwa penerapan nilai kesetaraan dalam konteks Indonesia tercermin pada Kurikulum Merdeka yang mengadopsi pendekatan GEDSI. Implementasi ini menekankan pendidikan yang peka terhadap perbedaan gender, disabilitas, dan sosial ekonomi. Selain itu, penelitian oleh Pratiwi et al. (2022) menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran kolaboratif dan inklusif mampu meningkatkan interaksi sosial setara di kelas serta mengurangi diskriminasi antar siswa.

Banyak guru yang belum terbiasa menggunakan pendekatan diferensiasi sehingga siswa yang memiliki kebutuhan khusus sering kali tertinggal dalam proses pembelajaran (OECD, 2022). Praktik pembelajaran yang terlalu seragam menyebabkan siswa dari latar budaya minoritas atau kemampuan akademik berbeda tidak mendapatkan kesempatan belajar yang adil. Selain itu, media pembelajaran yang bias terhadap budaya dominan dapat memperkuat stereotip. Oleh karena itu, guru perlu menguasai strategi pembelajaran yang adaptif dan inklusif. Dengan demikian, pembahasan menegaskan bahwa perubahan praktik pengajaran sangat penting dalam implementasi kesetaraan.

Peran orang tua dan masyarakat juga penting karena pendidikan tentang keberagaman tidak hanya terjadi di sekolah tetapi juga di lingkungan rumah. Kolaborasi ini membantu siswa memahami bahwa nilai kesetaraan bukan hanya norma sekolah, tetapi juga nilai sosial yang lebih luas. Selain itu, kolaborasi tersebut dapat memperkuat hubungan antara sekolah dan masyarakat dalam membangun budaya toleransi. Dengan demikian, pembahasan menekankan bahwa penerapan kesetaraan merupakan kewajiban bersama semua pihak. Kesimpulannya, pembahasan dalam penelitian ini menguatkan bahwa pendidikan multikultural yang berlandaskan humanisme adalah kunci terciptanya sekolah yang adil dan inklusif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil studi literatur terhadap tujuh artikel ilmiah, dapat disimpulkan bahwa **kesetaraan merupakan inti dari pendidikan multikultural** yang bersifat humanistik dan inklusif. Nilai ini bukan sekadar ideal moral, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan, kurikulum, dan interaksi pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesetaraan merupakan komponen fundamental dalam penyelenggaraan pendidikan yang inklusif dan multikultural. Konsep ini menegaskan bahwa setiap peserta didik memiliki hak yang sama untuk memperoleh kesempatan belajar yang adil tanpa diskriminasi berdasarkan budaya, agama, gender, maupun kondisi sosial. Pendidikan multikultural berperan besar dalam memperkuat implementasi kesetaraan melalui penyediaan ruang belajar yang menghargai keberagaman. Penelitian menunjukkan bahwa nilai humanistik menjadi landasan moral yang mendorong penghargaan terhadap martabat setiap individu. Dengan mengintegrasikan aspek multikultural dan humanistik, sekolah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan sosial dan emosional siswa. Selain itu, kesetaraan terbukti tidak hanya menjadi konsep normatif, tetapi hadir sebagai prinsip operasional dalam kurikulum, kebijakan sekolah, dan interaksi pedagogis. Oleh karena itu, kesetaraan menjadi fondasi penting dalam membangun pendidikan yang demokratis dan adil. Kesetaraan dalam pendidikan berarti memberi ruang bagi semua peserta didik untuk tumbuh sesuai potensinya dengan penghargaan terhadap keberagaman budaya, agama, gender, dan sosial. Pendidikan berbasis kesetaraan menciptakan iklim belajar yang adil, demokratis, dan menghargai kemanusiaan.

Implementasi nilai kesetaraan dalam pendidikan memerlukan pendekatan yang holistik dan strategis, khususnya pada perencanaan kurikulum, metode pembelajaran, dan budaya sekolah. Guru memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa praktik kelas berjalan secara responsif terhadap keragaman karakter dan kebutuhan peserta didik. Penggunaan strategi pembelajaran diferensiasi, media pembelajaran inklusif, serta interaksi yang empatik menjadi kunci terwujudnya lingkungan belajar yang setara. Penelitian juga menegaskan bahwa tantangan dalam penerapan kesetaraan sering kali muncul dari bias kultural, stereotip, dan pola pikir tradisional dalam pendidikan. Karena itu, penguatan kompetensi guru dalam bidang pedagogi multikultural menjadi sangat penting. Lembaga pendidikan juga harus memastikan bahwa kebijakan sekolah berpihak pada prinsip inklusi sosial dan penghargaan terhadap keberagaman. Secara keseluruhan, implementasi kesetaraan memerlukan komitmen kolektif antara guru, sekolah, dan masyarakat.

Ke depan, implementasi nilai kesetaraan perlu diperkuat melalui pelatihan guru berbasis multikultural, revisi kurikulum yang inklusif, serta penguatan kebijakan pendidikan yang menegaskan prinsip keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2021). Multicultural education in Indonesia: Challenges and opportunities. *Jurnal Pendidikan*, 12(2), 45–57. <https://journal.uin-malang.ac.id>
- Aragón, O., Martínez, R., & Lopez, M. (2021). Equity pedagogy in multicultural contexts. *Journal of Multicultural Studies*, 18(3), 112–128. <https://www.tandfonline.com>
- Banks, J. A. (2019). *Multicultural education: Issues and perspectives*. Wiley. <https://www.wiley.com/en-us/Multicultural+Education%3A+Issues+and+Perspectives>

- Gorski, P. (2021). *Re-envisioning equity in education*. Equity Literacy Institute. <https://www.equityliteracy.org/resources>
- Grant, C. A. (2020). *Intercultural pedagogy in diverse schools*. Springer. <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-43032-0>
- Hammond, Z. (2020). *Culturally responsive teaching and the brain*. Corwin Press. <https://crtandthebrain.com>
- Kaleja, G. (2013). Social equality through multicultural education. *Journal of Pedagogy and Education*, 5(1), 33–41.
- Kim, Y. (2022). Humanistic education in multicultural schools. *International Journal of Multicultural Learning*, 14(2), 78–90. <https://www.sciencedirect.com>
- Matin, S. (2022). Inclusive curriculum design in Asian schools. *Asian Education Review*, 9(1), 55–70. <https://www.taylorfrancis.com>
- Nurbayanti, N., Rahmawati, D., & Fadillah, A. (2024). Opportunities promoting social inclusion in elementary school learning. *Humanika*, 27(1), 15–28.
- OECD. (2022). *Inclusive education for a changing world*. OECD Publishing. <https://www.oecd.org/education>
- Pratiwi, R., & Annisa, N. (2023). Human diversity and equality. *Indonesian Journal of Social Education*, 5(2), 122–135.
- Pratiwi, R., Widayati, A., & Efendi, R. (2022). Implementation of multicultural education in economic learning. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9(4), 102–115.
- Pratiwi, R., Setiawan, H., & Utami, L. (2024). Insights into multicultural competence. *Jurnal Edukasi*, 12(1), 44–59.
- Rohmat. (2023). Strengthening multicultural values to develop equality. *Journal of Educational and Social Research*, 8(3), 88–97.
- Sleeter, C. E. (2020). Critical multicultural education research. *Journal of Multicultural Research*, 14(2), 23–38. <https://journals.sagepub.com>
- UNESCO. (2023). *Global education monitoring report: Inclusion and education*. UNESCO Publishing. <https://unesdoc.unesco.org>
- Widodo, A. (2023). Kurikulum Merdeka dan pendidikan multikultural. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 11(1), 66–79. <https://journal.sinta3.ac.id>
- Yuliana, R. (2024). Implementasi GEDSI dalam pendidikan Indonesia. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 9(1), 55–70. <https://ejournal.uny.ac.id>